

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin

Jeni Nurliza

Prodi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang
Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang 30128, Indonesia
nurlizajeni15@gmail.com

Bainil Yulina

Prodi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang
Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang 30128, Indonesia
byulina@gmail.com

Nurhasanah

Prodi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang
Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang 30128, Indonesia
nurhasanahrizkiramadhan@gmail.com

Article's History:

Received 23 June 2024; Received in revised form 17 July 2024; Accepted 28 July 2024; Published 1 August 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Nurliza, J., Yulina, B., & Nurhasanah. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (4). 2598-2609. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2803>

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Akuntabilitas Secara Parsial Terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. (2) Pengaruh Transparansi Secara Parsial Terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. (3) Pengaruh Partisipasi Masyarakat Secara Parsial Terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. (4) Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Secara Simultan Terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Dalam penelitian ini data mengenai Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat diperoleh penyebaran kuesioner. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 orang yang merupakan perangkat desa dan perangkat badan usaha milik desa. Penelitian ini menggunakan model Analisis Regresi Linier Berganda (*multiple linier regression*) dengan program spss 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara parsial Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Secara simultan Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa.

Pendahuluan

Program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu inisiatif pemerintah untuk memajukan perekonomian desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dianggap sebagai langkah awal menuju kemandirian ekonomi desa dan menggerakkan berbagai unit usaha desa. Hal ini karena ekonomi desa merupakan pusat utama penggerak kemajuan pembangunan desa. Pendirian BUMDes diyakini dapat memutar roda perekonomian desa dan dapat mewujudkan pemerataan ekonomi dengan menciptakan berbagai usaha di desa. Pendirian BUMDes juga dilandasi oleh pemikiran yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat mengenai

lapangan pekerjaan, tingkat kemiskinan dan pemanfaatan berbagai potensi yang ada, sehingga BUMDes yang didirikan memiliki ciri khas tersendiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengelolaannya, BUMDes diharapkan dapat memenuhi manajemen tata kelola usaha yang memiliki prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses pelaporan laporan keuangan usahanya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Banyuasin III adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Banyuasin III, BUMDes berfungsi sebagai badan usaha yang mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa melalui transparansi pengelolaan keuangan BUMDes. Akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Banyuasin III berarti bahwa BUMDes harus dapat memberikan laporan keuangan yang jelas dan akurat, serta dapat menjelaskan penggunaan dana yang diterima. Transparansi pengelolaan keuangan BUMDes berarti bahwa BUMDes harus dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang penggunaan dana yang diterima, serta dapat menjelaskan keputusan pengelolaan keuangan yang diambil. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Banyuasin III berarti bahwa masyarakat harus dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan keuangan desa melalui pengawasan dan pengendalian keuangan BUMDes, serta dapat memberikan masukan dan saran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan BUMDes.

Secara spesifik, kondisi transparansi keuangan di beberapa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kecamatan Banyuasin III saat ini masih belum mencapai standar yang diharapkan. Sebagai objek penelitian, BUMDes di Kecamatan Banyuasin III menunjukkan adanya kendala dalam hal penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Meskipun telah diatur dalam undang-undang bahwa BUMDes harus menyajikan laporan keuangannya, namun pada praktiknya masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan transparansi keuangan desa yang berpengaruh pada akuntabilitasnya. Penelitian ini menyoroti pentingnya, dan juga membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut, bagaimana prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan di BUMDes untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang efektif.

Mengingat pentingnya peran akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bumdes bagi desa, maka diperlukan penelitian yang kuat untuk menganalisis aspek akuntabilitas, transparansi Bumdes dalam pembukuan dan penyusunan laporan keuangan, serta partisipasi masyarakat sebagai bentuk evaluasi dan pengawasan apakah Bumdes mengikuti peraturan yang mengatur keuangan yang ada. Dari hal tersebut menjadi dasar peneliti untuk mengambil judul penelitian "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin".

Tinjauan Pustaka

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, "Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa".

Permendagri Nomor 4 Tahun 2015 mengatur tentang proses pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan tujuan dari pendiriannya. BUMDes dibentuk sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian Desa mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
2. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
3. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga.
4. Membuka lapangan kerja.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum.

Menurut buku panduan pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007 empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa;
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa;
- 3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan

Pendirian dan pengolahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengolahan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable. Oleh karena itu perlu adanya upaya serius dalam pelaksanaannya agar dapat berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri.

Akuntabilitas

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa “didalamnya menyebutkan bahwa salah satu kewajiban administratif didalam suatu pemerintah desa merupakan melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, ini tidak terlepas dari dana yang diberikan setiap tahun kemudian ditransferkan kepada pemerintah desa yang setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan”. Akuntabilitas pemerintah merupakan salah satu bagian dari isu kebijakan yang strategis di Indonesia, karena perbaikan akuntabilitas pemerintah berdampak dalam upaya terciptanya good governance atau pemerintahan yang baik.

Menurut Mahmudi (2015: 9) menyebutkan bahwa Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan apa yang telah atau tidak dilakukan oleh seseorang serta harus diikuti dengan sebuah pemberian kapasitas untuk melaksanakan keleluasan suatu kewenangan.

Transparansi

Transparansi pada kerangka konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut buku Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (2024: 44). Adapun prinsip-prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia adalah:

- 1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
- 2) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
- 3) Adanya laporan berkala mengenai laporan pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- 4) Laporan tahunan
- 5) Website atau media organisasi
- 6) Pedoman dalam penyebaran informasi

Menurut Didjaja (2003:261) menyebutkan bahwa prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal diantaranya:

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana)
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Dwiningsi (2015:61) partisipasi dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

1. partisipasi dalam pengambilan Keputusan
Partisipasi jenis ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi jenis ini sangat penting karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. adapun wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini bisa bermacam-macam seperti: hadir rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang di tawarkan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
Partisipasi jenis ini merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Dalam pelaksanaan program sangat dibutuhkan

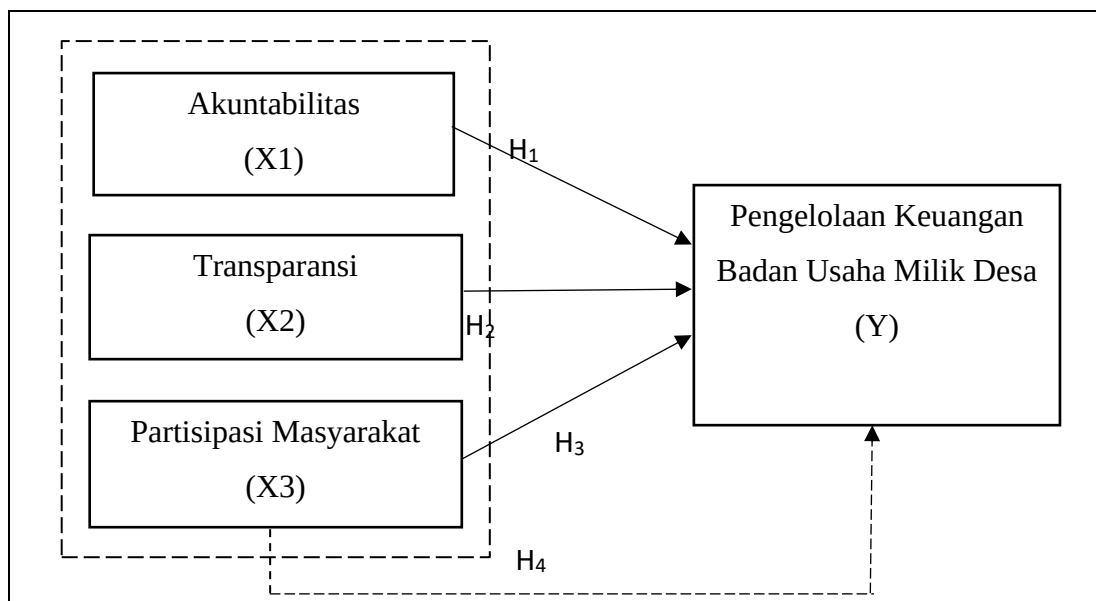
keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Partisipasi jenis ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kuantitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan “output”. Sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar presentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau tidak.

4. Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi jenis ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.



Sumber: Data yang diolah, 2024

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

Keterangan:

→ : Pengaruh secara parsial
 ----- : Pengaruh secara simultan

Metodelogi

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010:11) menjelaskan “bahwa penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain”. Untuk pendekatan kuantitatif dijelaskan bahwa pendekatan dengan menggunakan kuantitatif karena menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Selain merupakan penelitian deskriptif dan kuantitatif, penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan karena penelitian ini dilakukan dalam kehidupan nyata di lapangan.

Tabel 3. 1

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Difinisi	Indikator Variabel	Skala
Akuntabilitas (X1)	Pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan	1. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa	

Variabel	Difinisi	Indikator Variabel	Skala
	pelaksanaan kebijakan yang telah diamanahkan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.	2. Pengawasan oleh tim pelaksana 3. Adanya laporan pertanggungjawaban 4. Keterbukaan proses pengelolaan 5. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan, dan pertanggungjawaban	Ordinal
Transparansi (X2)	Transparansi adalah penjelasan yang di jelaskan oleh manajemen organisasi publik tentang aktivitas, kegiatan ataupun program yang sudah, sedang, atau akan dilaksanakan dan sumber daya yang akan digunakan (Mahmudi 2015)	1. Informativeness (informatif) 2. Openes (keterbukaan) 3. Disclouser (pengungkapan)	Ordinal
	Keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek/program yang dikerjakan oleh masyarakat lokal.	1. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan 2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan 3. Adanya pengawasan dari masyarakat. 4. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa	Ordinal
Pengelolaan Keuangan BUMDes (Y)	Keuangan yang digunakan oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam menjalankan operasional dan kegiatan usahanya.	1. Perencanaan 2. Pengawasan 3. Pelaksanaan 4. Pertanggung jawaban	Ordinal

Sumber: Data diolah, 2024

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini peneliti mengambil 5 (lima) BUMDes sebagai lokasi penelitian diantaranya: BUM Desa Agung Mandiri Tanjung Agung, BUM Desa Makmur Jaya Tanjung Menang, BUM Desa Maju Bersama Terlangu, BUM Desa Agung Jaya Regan Agung dan BUM Desa Mitha Tanjung Kepayang. Peneliti memilih BUMDes sebagai lokasi penelitian karena BUMDes memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, BUMDes juga memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, penelitian tentang akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan BUMDes dapat membantu memahami bagaimana BUMDes dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa. Serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan BUMDes yang lebih transparan dan akuntabel.

Jumlah sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2
Badan Usaha Milik Desa Yang Menjadi Populasi

No	Badan Usaha Milik Desa	Responden	Jumlah
1	BUMDesa Agung Mandiri Tanjung Agung	1 Kepala desa, 6 Perangkat/Staff desa, 1 Kepala Bumdes, 2 Perangkat/Staff BUMDes	10
2	BUMDesa Makmur Jaya Tanjung Menang	1 Kepala desa, 6 Perangkat/Staff desa, 1 Kepala Bumdes, 2 Perangkat/Staff BUMDes	10
3	BUMDesa Maju Bersama Terlangu	1 Kepala desa, 6 Perangkat/Staff desa, 1 Kepala Bumdes, 2 Perangkat/Staff BUMDes	10
4	BUMDesa Agung Jaya Regan Agung	1 Kepala desa, 6 Perangkat/Staff desa, 1 Kepala Bumdes, 2 Perangkat/Staff BUMDes	10
5	BUMDesa Mitha Tanjung Kepayang	1 Kepala desa, 6 Perangkat/Staff desa, 1 Kepala Bumdes, 2 Perangkat/Staff BUMDes	10
	Total		50

Sumber: Peneliti 2024

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam pelaksanaan pengumpulan data primer, peneliti menggunakan Teknik penyebaran kuesioner. Kuesioner tersebut disebarikan untuk diisi oleh responden yang dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan BUMDesa.

Teknik Analisis Data

Analisis data dapat dikatakan sebagai proses memanipulasi data penelitian agar data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian. Penggunaan alat analisis sebenarnya bergantung pada apakah variabel yang akan diteliti itu bersifat dependen (jelas variabel dependen dan independennya) atau interdependen (variabel dependen dan independennya diabaikan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data dan menguji hipotesis diolah dengan Software SPSS versione 26. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari uji analisis statistik deskriptif, Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji realibilitas. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastitas. Selanjutnya Teknik analisis regresi linier berganda, uji hipotesis terdiri dari koefisien determinasi (R^2), Uji signifikansi parsial (uji T) dan Uji signifikansi simultan (uji f).

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Hasil analisis statistik deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai karakteristik dari serangkaian data tanpa mengambil Kesimpulan umum (Ghozali,2016). Analisis deskriptif merupakan penyajian data berupa tabulasi sehingga mudah untuk dipahami. Mengenai hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4. 1
Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	50	27.00	35.00	30.7200	2.49931
Transparansi	50	24.00	35.00	30.7000	2.95718
Partisipasi Masyarakat	50	18.00	30.00	25.3200	2.78069
Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa	50	19.00	30.00	26.2000	2.55551
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui hasil uji analisis statistik deskriptif yaitu minimum (terendah), nilai maksimum (tertinggi), nilai rata-rata (mean) dan standar devisiasi sebagai berikut:

1. Variabel akuntabilitas (X1) dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 27, nilai maksimum 35, nilai rata-rata akuntabilitas 30.7200 dan standar deviasi data akuntabilitas adalah 2.49931
2. Variabel transparansi (X2) dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 24, nilai maksimum 35, nilai rata-rata transparansi 30.7000 dan standar deviasi data transparansi adalah 2.95718
3. Variabel partisipasi masyarakat (X3) dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 18, nilai maksimum 30, nilai rata-rata partisipasi masyarakat 25.3200 dan standar deviasi data partisipasi masyarakat adalah 2.78069
4. Variabel pengelolaan keuangan badan usaha milik desa (Y) dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 19, nilai maksimum 30, nilai rata-rata pengelolaan keuangan badan usaha milik desa 26.2000 dan standar deviasi data pengelolaan keuangan badan usaha milik desa adalah 2.55551

Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 4. 2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.57677077
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.069
	Negative	-.091
Test Statistic		.091
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Hasil olah data

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* pada tabel diatas, diketahui nilai probabilitas p atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Maka regresi ini terdistribusi normal dan dapat diterima karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* $0,200 > 0,05$. Hal ini berarti asumsi normalitas dipenuhi. Selain menggunakan analisis statistik, uji normalitas juga dapat dilihat dengan menggunakan analisis grafik berupa histogram dan normal P-Plot. Berikut merupakan hasil dari analisis grafik.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Akuntabilitas	.604	1.656
	Transparansi	.507	1.971

	Partisipasi Masyarakat	.612	1.633
a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa			

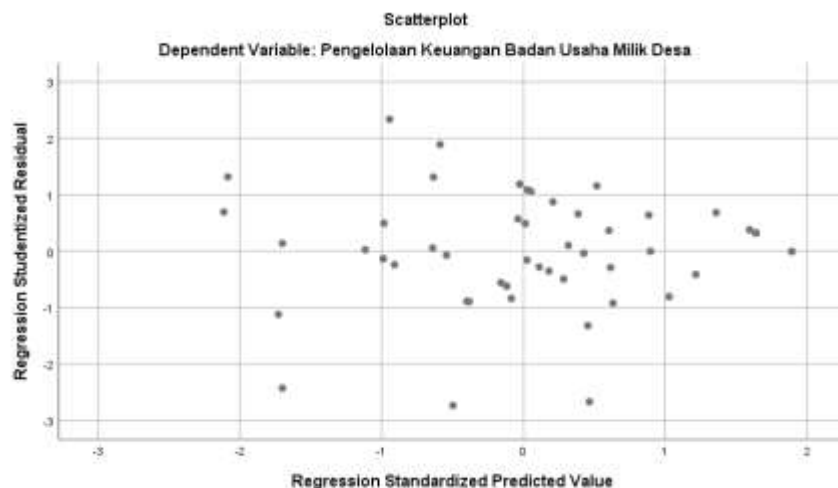
Sumber: Hasil olah data

Dalam penelitian ini data yang digunakan dalam uji multikolinearitas ini adalah data dari variabel independen. Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil sebagai berikut.

1. Nilai VIF untuk variabel Akuntabilitas (X1) adalah $1.656 < 10$ dengan nilai *Tolerance* adalah $0.604 > 0.10$ maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikoloniearitas.
2. Pada variabel Transparansi (X2) diperoleh nilai VIF sebesar $1.971 < 10$ dengan nilai *Tolerance* adalah $0.507 > 0.10$ maka dapat disimpulkan bahwa Transparansi dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikoloniearitas.
3. Pada variabel Partisipasi Masyarakat (X3) diperoleh nilai VIF sebesar $1.633 < 10$ dengan nilai *Tolerance* adalah $0.612 > 0.10$ maka dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikoloniearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak adanya heterokedastisitas. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan scatter plot dan uji glesjer. Berikut merupakan hasil dari analisis scatter plot yang tertera pada gambar dibawah ini.



Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Terlihat pada tampilan grafik scatterplot diatas, bahwa titik-titik menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, dan data tersebut menyebar secara acak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi, analisis dengan menggunakan scatter plot memiliki kelemahan yang cukup signifikan karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil *plotting*. Semakin sedikit jumlah sampel pengamaan, maka semakin sulit pula menginterpretasikan hasil scatter plot. Oleh karena itu diperlukan uji statistik yang lebih akurat untuk menjamin keakuratan hasil yang didapatkan yaitu menggunakan uji glesjer. Uji glesjer dilakukan dengan meregresikan nilai absolute residual (AbsRes) terhadap variabel independen, berikut merupakan dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas melalui uji glesjer. Jika nilai Sig. > 0.05 maka Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai Sig. < 0.05 Terjadi gejala heteroskedastisitas

Berikut merupakan hasil dari Uji Heteroskedastisitas yang tersaji pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4. 4

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.848	1.980		2.448	.018
	Akuntabilitas	-.057	.078	-.131	-.724	.473
	Transparansi	.007	.072	.019	.096	.924
	Partisipasi Masyarakat	-.086	.070	-.222	-1.234	.223

a. Dependent Variable: ABSRES

Sumber : Hasil olah data

Nilai probabilitas (Sig) dari variabel Akuntabilitas sebesar 0.473, pada variabel Transparansi sebesar 0.924, dan dari variabel Partisipasi Masyarakat sebesar 0.223. Karena nilai probabilitas (Sig) dari semua variabel lebih dari signifikansi 0.05 atau 5% maka dapat disimpulkan asumsi homoskedastisitas terpenuhi yang artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Hasil Regresi Linear Berganda

Tabel 4. 5
Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.030	3.030		.340	.736
	Akuntabilitas	.299	.120	.293	2.501	.016
	Transparansi	.311	.110	.360	2.819	.007
	Partisipasi Masyarakat	.254	.107	.276	2.375	.022

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa

Sumber : Hasil olah data

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel diatas, diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 1.030 + 0.299X_1 + 0.311X_2 + 0.254X_3$$

Dimana:

Y = Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa

X1 = Akuntabilitas

X2 = Transparansi

X3 = Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan model regresi linear berganda diatas, didapatkan informasi sebagai berikut.

1. Nilai konstanta (a) memiliki nilai sebesar 1.030. Nilai tersebut artinya apabila variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat sebesar 0, maka variabel Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa bernilai adalah 1.030.
2. Nilai koefisien regresi variabel Akuntabilitas (X1) memiliki nilai sebesar 0.299. Nilai tersebut artinya apabila akuntabilitas meningkat sebesar satu satuan maka Pengelolaan Keuangan Badan Milik Desa akan meningkat sebesar 0.299. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara Akuntabilitas dengan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa.
3. Nilai koefisien regresi variabel Transparansi (X2) memiliki nilai sebesar 0.311. Nilai tersebut artinya Transparansi meningkat sebesar satu satuan maka Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa akan meningkat sebesar 0.311. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara Transparansi dengan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa.
4. Nilai koefisien regresi variabel Partisipasi Masyarakat (X3) memiliki nilai sebesar 0.254. Nilai tersebut artinya Partisipasi Masyarakat meningkat sebesar satu satuan maka Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa sebesar 0.254. koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara Partisipasi Masyarakat dengan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa.

Uji Hipotesis**Uji Koefisien Determinasi**

Tabel 4. 6
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.787 ^a	.619	.594	1.62738
a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Transparansi				
b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa				

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, nilai R^2 (*Adjusted R Square*) dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (independen) dalam menerangkan variabel terikat (dependen). Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa nilai R^2 sebesar 0.594 hal ini berarti bahwa 59.4% variabel dependent Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa dapat dijelaskan oleh variasi dari tiga variabel independen yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. Sedangkan sisanya sebesar $(100\% - 59.4\% = 40.6\%)$ dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen secara bersama-sama terhadap satu variabel dependen, dasar untuk pengambilan keputusan Uji F ini adalah sebagai berikut: Jika nilai Sig. < 0.05 atau Fhitung > Ftabel maka variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Jika nilai Sig. > 0.05 atau Fhitung < Ftabel maka variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan sampel sebanyak 50, variabel independen 3 dan taraf nyata 5%, maka didapatkan Ftabel sebesar $(k; n-k-1) = (3, 46) = 2.806$

Tabel 4. 7
Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	198.176	3	66.059	24.943	.000 ^b
	Residual	121.824	46	2.648		
	Total	320.000	49			
a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa						
b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Transparansi						

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan Tabel diatas didapatkan informasi nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ dan nilai Fhitung sebesar $24.943 > F_{tabel}$ sebesar 2.806 yang artinya variabel independen berupa Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap variabel dependent Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang secara simultan dari variabel independen yang berupa Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap variabel dependent berupa Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa.

Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji parsial dapat dilakukan melalui statistik uji *t* dengan cara membandingkan nilai Sig. *t* dengan nilai alpha 0.05 dan juga thitung dengan ttabel, dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika Sig. <

0.05, atau jika positif ketika $t_{hitung} > t_{tabel}$, sedangkan jika negatif ketika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka variabel independent berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Jika $Sig. > 0.05$, atau jika positif ketika $t_{hitung} < t_{tabel}$, sedangkan jika negatif ketika $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka variabel independent tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan sampel sebanyak 50, variabel independen 3 dan taraf nyata 5%, maka didapatkan t_{tabel} sebesar $(\alpha/2; n-k) = (0.025; 47) = 2.011$

Tabel 4. 8
Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.030	3.030		.340	.736
	Akuntabilitas	.299	.120	.293	2.501	.016
	Transparansi	.311	.110	.360	2.819	.007
	Partisipasi Masyarakat	.254	.107	.276	2.375	.022

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan hasil uji t, yang tersaji pada Tabel diatas diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Variabel Akuntabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0.016, nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Sedangkan untuk t hitung didapatkan nilai sebesar 2.501 > t_{tabel} (2.011) maka variabel Akuntabilitas berpengaruh terhadap variabel Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. Sehingga hipotesis pertama, H_1 : variabel Akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap variabel Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa "diterima".
2. Variabel Transparansi memiliki nilai signifikansi sebesar 0.007, nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Sedangkan untuk t hitung didapatkan nilai sebesar 2.819 > t_{tabel} (2.011) maka variabel Transparansi berpengaruh terhadap variabel Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. Sehingga hipotesis kedua, H_2 : variabel Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap variabel Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa "diterima".
3. Variabel Partisipasi Masyarakat memiliki nilai signifikansi sebesar 0.022, nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Sedangkan untuk t hitung didapatkan nilai sebesar 2.375 > t_{tabel} (2.011) maka variabel Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap variabel Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. Sehingga hipotesis ketiga, H_3 : variabel Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap variabel Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa "diterima".

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Banyuasin III

Penelitian ini memberikan berhipotesis bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan badan usaha milik desa sebagai H_1 . Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung variabel akuntabilitas lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan badan usaha milik desa yang berarti H_1 diterima karena akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan badan usaha milik desa di kecamatan banyuasin III Kabupaten banyuasin.

Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Banyuasin III

Penelitian ini memberikan berhipotesis bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan badan usaha milik desa sebagai H_2 . Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung variabel transparansi lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan badan usaha milik desa yang berarti H_2 diterima karena transparansi

berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan badan usaha milik desa di kecamatan banyuasin III Kabupaten banyuasin.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Banyuasin III

Penelitian ini berhipotesis bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan badan usaha milik desa sebagai H_3 . Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung variabel partisipasi masyarakat lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan badan usaha milik desa yang berarti H_3 diterima karena partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan badan usaha milik desa di kecamatan banyuasin III Kabupaten banyuasin.

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Banyuasin III

Penelitian ini memberikan hipotesis bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan badan usaha milik desa secara simultan H_4 . Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi uji f sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan badan usaha milik desa. Artinya H_4 diterima karena akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara bersamaan terhadap pengelolaan keuangan badan usaha milik desa di kecamatan banyuasin III kabupaten banyuasin.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan badan usaha milik desa kecamatan banyuasin III kabupaten banyuasin.

1. Akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan badan usaha milik desa menunjukan bahwa pengelolaan keuangan tersebut dilakukan secara transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan badan usaha milik desa menunjukan bahwa tingkat transparansi atau keterbukaan mengenai pengelolaan keuangan badan usaha milik desa sudah dikatakan transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui tentang keuangan badan usaha milik desa.
3. Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan badan usaha milik desa menunjukan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan badan usaha milik desa sudah dikatakan baik dan pemerintah telah melibatkan masyarakat dalam pengambilan Keputusan.
4. Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan badan usaha milik desa berarti apabila akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat ditingkatkan secara bersama maka semakin baik pula dalam pengelolaan keuangan badan usaha milik desa.

Referensi

- Didjaja, M. (2003). *Transparansi Pemerintah*. Rineka Cipta.
- Dwiningsi, S. I. A. (2015). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Mayasari, R., Febriantoko, J., Masnila, N., Ariyanti, I., Jumeilah, F. S., Putra, M. S. G. P., & Tunggal, T. (2024). *Buku Referensi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*. Penerbit NEM.
- Menteri, P. (2007). *Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*.
- Nasional, D. P., Ekonomi, F., & Brawijaya, U. (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*.
- Pemerintah Peraturan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kementerian Dalam Negeri.